



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEROMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3459442; FAKSIMILE (021) 3459443; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-658/PKI/2015

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Laporan Realisasi APBD
Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III

21 Oktober 2015

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi kebijakan Pemerintah di bidang desentralisasi fiskal, diperlukan data berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan III untuk provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah agar menyampaikan laporan realisasi APBD dimaksud yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2015 dalam format terlampir dan dikirimkan kepada:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710**

Demikian disampaikan, **dimohon menyampaikan data sesuai dengan format yang diminta.** Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Evaluasi Pendanaan
dan Informasi Keuangan Daerah



Rutut Hariyanto
NIP.19730709 199803 1 001 2

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
LAPORAN REALISASI APBD s.d. TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Realisasi s.d. Triwulan I (Januari-Maret)	Realisasi s.d. Semester I (Januari-Juni)	Realisasi s.d. Triwulan III (Januari-September)
4	PENDAPATAN			
	PAD			
4.1	Pajak daerah			
4.1.1	Retribusi daerah			
4.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
4.1.3	Lain-lain PAD yang sah			
4.1.4				
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)			
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
4.2.2.2	Dana Penyesuaian			
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi			
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
4.2.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
4.2.4.1	Pendapatan Hibah			
4.2.4.2	Pendapatan Dana Darurat			
4.2.4.3	Pendapatan Lainnya			
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.1	Belanja Pegawai			
5.1.2	Belanja Barang			
5.1.3	Belanja Bunga			
5.1.4	Belanja Subsidi			
5.1.5	Belanja Hibah			
5.1.6	Belanja Bantuan sosial			
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.1	Tanah			
5.2.2	Peralatan dan Mesin			
5.2.3	Gedung dan Bangunan			
5.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan			
5.2.5	Aset tetap lainnya			
5.2.6	Aset lainnya			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.1	Belanja tidak terduga			
5.4	TRANSFER			
5.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa			
5.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa			
5.4.3	Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa			
5.4.4	Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa			
6	BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT			
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.1	Penggunaan SILPA			
6.1.2	Pencairan dana cadangan			
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			

Daerah, tanggal
Kepala

Tanda tangan & Stempel

Nama
NIP